



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 9 Juni 2021

Nomor : 936/DJU.2/PP.00.4/6/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

Yth. : Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera, Panitera Muda Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, Jaksa Wilayah Makassar, Polresta Makassar, dan Pegawai Lembaga Kemasyarakatan Wilayah Makassar yang namanya tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mohon Peserta Kegiatan untuk melakukan registrasi melalui :
<http://bit.ly/penangananperkaraiberbasisrestoratifkeadilan> paling lambat tanggal **22 Juni 2021**
- Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan pada tanggal **29 Juni s.d 1 Juli 2021**.
 - Tempat** : Novotel Makassar Grand Shayla Jl. Chairil Anwar No. 28 Sawerigading, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90115
Telp : (0411) 3619444.
 - Waktu**
 - Check in** : Selasa, Pukul 14.00 WITA s.d 16.00 WITA
 - Pembukaan** : Selasa, Pukul 19.30 WITA s.d Selesai
 - Penutupan** : Kamis, Pukul 10.30 WITA s.d Selesai
- Pakaian:**
 - Pakaian Batik Lengan Panjang (untuk acara malam hari); dan
 - Pakaian Dinas Harian (PDH).
- Wajib Menyerahkan:**
 - Tiket Pesawat ekonomi** dan **boarding pass pergi - pulang (PP) YANG SAH** dari Tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat kedudukan semula, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara yang disertai **nominal harga**.
 - Tiket kapal laut** bagi peserta yang menggunakan transportasi laut yang disertai **nominal harga tiket**.
 - Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi** diharap melampirkan **Bon Pengisian BBM**.
 - Surat Keterangan** yang menyatakan telah melakukan **Swab Test (antigen)**;
 - Peserta dimohon untuk melampirkan **bukti pembayaran/kwitansi Swab Test (antigen)**, untuk biaya swab test yang akan digantikan sesuai dengan Pagu Anggaran Ditjen Badilum sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum;
- Konfirmasi kehadiran** Peserta harap segera diinformasikan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 dan hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 - Bypass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1509.
Contact Person HP. 085782479899 (Tietie), 08128311587 (Zubair), 08161427335 (M.Rifa'i)
Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
DIREKTUR
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum


LUCAS PRAKOSO., S.H., M. Hum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR: 1376/DJU/SK/PP.00.4/6/2021
TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan kemampuan di bidang manajerial maka diperlukan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
19. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial;
20. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, dan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08HM.03.02tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
21. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 170/SEK/SK/III/2018;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang TAPM Badilum Nomor 1639/DJU/SK/OT 01.1/9/2015;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 05/DJU.1/SK/KI01/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal **29 Juni s.d 01 Juli 2021**.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
5. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;
6. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1376/DJU/SK/PP.00.4/6/2021
TANGGAL : 9 Juni 2021

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO	NAMA	GOL/R G	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
1	FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. NIP. 19760214 200112 1 004	IV/b	HAKIM PN MAKASSAR	L	PT MAKASSAR
2	ACHMAD RASJID, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	IV/b	HAKIM PN MAKASSAR	L	PT MAKASSAR
3	Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. NIP. 19711018 199903 1 004	IV/b	HAKIM PN MAKASSAR	L	PT MAKASSAR
4	SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. NIP. 19770526 200012 2 002	IV/b	HAKIM PN MAKASSAR	P	PT MAKASSAR
5	FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,L.L.M. NIP. 19771215 200112 1 002	IV/a	HAKIM PN MAKASSAR	L	PT MAKASSAR
6	ANDI HAJERAWATI, SH NIP. 19641231 198703 2 026	III/d	PANMUD PIDANA PN MAKASSAR	P	PT MAKASSAR
7	RIDWAN, S.H., M.H. NIP. 19690706 199603 1 002	IV/c	WAKIL KETUA PN SUNGGUMINASA	L	PT MAKASSAR
8	IBNU RUSYDI, SH NIP. 19640801 199103 1 005	IV/b	HAKIM PN SUNGGUMINASA	L	PT MAKASSAR
9	RISTANTI RAHIM, SH., M.H NIP. 19770427 200112 2 002	IV/a	HAKIM PN SUNGGUMINASA	P	PT MAKASSAR
10	RADEN NURHAYATI, S.H., M.H. NIP. 19780807 200212 2 003	IV/a	HAKIM PN SUNGGUMINASA	P	PT MAKASSAR
11	SULAIMAN, SH., MH NIP. 19740611 200212 1 001	III/d	PANITERA PN SUNGGUMINASA	L	PT MAKASSAR
12	ANDI NURMAWATI, S.H., M.H. NIP. 19740807 199903 2 002	IV/b	KETUA PN MAROS	P	PT MAKASSAR
13	RUBIANTI, S.H., M.H NIP. 19790117 200212 2 002	IV/a	Hakim PN MAROS	P	PT MAKASSAR
14	JUSDI PURMAWAN, SH, MH NIP. 19770717 200502 1 001	IV/a	Hakim PN MAROS	L	PT MAKASSAR
15	MASTUR, SH NIP. 19720918 199303 1 004	III/d	PANITERA PN MAROS	L	PT MAKASSAR
16	AHMAD SYARIF, S.H., M.H. NIP. 19760111 200003 1 002	IV/a	HAKIM PN WATAMPONE	L	PT MAKASSAR
17	IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. NIP. 19761013 200112 2 003	IV/a	HAKIM PN WATAMPONE	P	PT MAKASSAR
18	ERNAWATI ANWAR, S.H. NIP. 19760104 200112 2 001	IV/a	HAKIM PN WATAMPONE	P	PT MAKASSAR
19	SRI SURYANINGSIH, SH NIP. 198408012006042002	III/c	Panmud Pidana PN WATAMPONE	P	PT MAKASSAR
20	RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H. NIP. 19751227 200112 1 004	IV/a	WAKIL KETUA PN MAKALE	L	PT MAKASSAR
21	YOHANIS PEDA PANOTO, S.H. NIP. 19620203 198903 1 003	IV/a	PANITERA PN MAKALE	L	PT MAKASSAR
22	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H. NIP. 19750816 199903 1 003	IV/b	KETUA PN BULUKUMBA	L	PT MAKASSAR

NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
23	SERA ACHMAD, SH., M.H NIP. 19791025 200502 2 001	IV/a	HAKIM PN BULUKUMBA	P	PT MAKASSAR
24	ABDUL BASYIR, SH, MH NIP. 19720813 200502 1 001	IV/a	HAKIM PN BULUKUMBA	L	PT MAKASSAR
25	ARMIN, SH., MH NIP. 19651231 198903 1 036	IV/a	PANITERA PN BULUKUMBA	L	PT MAKASSAR
26	KHUSNUL KHATIMAH, S.H. NIP. 19781031 200212 2 002	IV/a	KETUA PN PARE-PARE	P	PT MAKASSAR
27	NURHUDA, S.H., M.H. NIP. 19810412 200312 2 010	IV/a	WAKIL KETUA PN PARE-PARE	P	PT MAKASSAR
28	HASMA H., SE., SH NIP. 19680515 199203 2 001	III/d	PANITERA PN PARE-PARE	P	PT MAKASSAR
29	UJANG IRFAN HADIANA, SH NIP. 19780529 200212 1 005	IV/a	KETUA PN BANTAENG	L	PT MAKASSAR
30	I MADE BAGIARTA, SH., MH NIP. 19770201 200212 1 004	IV/a	WAKIL KETUA PN BANTAENG	L	PT MAKASSAR
31	MARHANI M., SH., MH NIP. 19731106 199803 2 004	IV/a	PANITERA PN BANTAENG	P	PT MAKASSAR
32	HASANUDDIN M, SH, MH NIP. 19760526 199903 1 002	IV/b	KETUA PN PALOPO	L	PT MAKASSAR
33	ARIEF WINARSO, SH NIP. 19761125 200112 1 002	IV/a	HAKIM PN PALOPO	L	PT MAKASSAR
34	ANDI MAKMUR, SH NIP. 19651231 198603 1 016	IV/a	PANITERA PN PALOPO	L	PT MAKASSAR
35	BENEDICTUS RINANTA, S.H. NIP. 19780717 200312 1 001	IV/a	WAKIL KETUA PN WATANSOPPENG	L	PT MAKASSAR
36	SULAEMAN, SH NIP. 19711231 199203 1 017	III/d	PANMUD PIDANA PN WATANSOPPENG	L	PT MAKASSAR
37	HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H. NIP. 19741231 199303 2 001	IV/b	WAKIL KETUA PN SENGGANG	P	PT MAKASSAR
38	ANASTASIUS RICO HARATUA SITANGGANG, SH, MKN NIP. 19780108 200312 1 001	IV/a	HAKIM PN SENGGANG	L	PT MAKASSAR
39	MANSYUR, SH NIP. 19640620 198603 1 006	IV/a	PANITERA PN SENGGANG	L	PT MAKASSAR
40	RONNY WIDODO, S.H., M.H. NIP. 19770506 200212 1 005	IV/a	KETUA PN BARRU	L	PT MAKASSAR
41	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19770201 200212 1 003	IV/a	WAKIL PN ENREKANG	L	PT MAKASSAR
42	M. ARIS B, SH NIP. 19720307 199303 1 003	III/b	PANMUD PIDANA PN ENREKANG	L	PT MAKASSAR
43	DAVID FREDO CHARLES SOPLANT, S.H., M.H NIP. 19770826 200604 1 004	III/d	HAKIM PN MAMUJU	L	PT MAKASSAR
44	YURHANUDIN KONA, S.H. NIP. 19771028 200704 1 001	III/d	HAKIM PN MAMUJU	L	PT MAKASSAR

NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
45	HARLY YUNUS, SH NIP. 19671028 199103 1 003	IV/a	PANITERA PN MAMUJU	L	PT MAKASSAR
46	ERNAWATY, S.H., M.H. NIP. 19760729 200112 2 001	IV/a	KETUA PN SIDENRENG RAPPANG	P	PT MAKASSAR
47	ANWAR, SPd., SH NIP. 19641231 198603 1 043	III/d	PANITERA PN SIDENRENG RAPPANG	L	PT MAKASSAR
48	ARWANA, SH NIP. 19780501 200112 2 001	IV/a	KETUA PN TAKALAR	P	PT MAKASSAR
49	ENDAH SRI ANDRIYATI, S.H., M.H. NIP. 19780316 200212 2 001	IV/a	WAKIL KETUA PN TAKALAR	P	PT MAKASSAR
50	Drs. ANDI BASO OPU NIP. 19641016 199203 1 001	III/d	PANITERA PN TAKALAR	L	PT MAKASSAR
51	I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H., M.H. NIP. 19770904 200112 1 001	IV/a	KETUA PN SELAYAR	L	PT MAKASSAR
52	BILI ABI PUTRA, SH, MH NIP. 19840502 200805 1 001	III/d	HAKIM PN SELAYAR	L	PT MAKASSAR
53	ABIDIN, SH NIP. 19660507 198803 1 002	III/d	PANITERA PN SELAYAR	L	PT MAKASSAR
54	PATANUDDIN, S.H.,M.H. NIP. 19791229 200312 1 001	IV/a	WAKIL PN JENEPONTO	L	PT MAKASSAR
55	DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn. NIP. 19820328 200912 2 006	III/d	HAKIM PN JENEPONTO	P	PT MAKASSAR
56	SUMARNI USMAN, SH NIP. 19640303 198903 2 003	III/d	PANITERA PN JENEPONTO	P	PT MAKASSAR
57	AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH, M.Hum NIP. 19760207 200112 1 003	IV/a	KETUA PN SINJAI	L	PT MAKASSAR
58	MENRIATI TARRO, SH NIP. 19651231 198503 2 006	III/d	PANITERA PN SINJAI	P	PT MAKASSAR
59	RONY SUATA, S.H., M.H. NIP. 19790124 200212 1 004	IV/a	KETUA PN POLEWALI	L	PT MAKASSAR
60	ANWAR, SH NIP. 19631231 198303 1 007	III/c	PANMUD PIDANA PN POLEWALI	L	PT MAKASSAR
61	TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H. NIP. 19780606 200112 1 002	IV/a	KETUA PN PINRANG	L	PT MAKASSAR
62	SAMZANG, SH NIP. 19720609 199303 2 002	III/d	PANMUD PIDANA PN PINRANG	P	PT MAKASSAR
63	ILHAM, S.H., M.H. NIP. 19770630 200312 1 001	IV/a	KETUA PN PANGKAJENE	L	PT MAKASSAR
64	SADAR SUANNA, SH NIP. 19661230 199303 1 005	III/d	PANITERA PN PANGKAJENE	L	PT MAKASSAR
65	HERNAWAN, S.H., M.H. NIP. 19780801 200312 1 001	IV/a	KETUA PN MAJENE	L	PT MAKASSAR
66	RITA LATI, SE.,MH NIP. 19641127 199303 2 002	III/d	PANITERA PN MAJENE	P	PT MAKASSAR

NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
67	ALFIAN, S.H. NIP. 19750521 200012 1 001	IV/b	KETUA PN MALILI	L	PT MAKASSAR
68	ARMAN, SH NIP. 19720530 199303 1 001	III/d	PANITERA PN MALILI	L	PT MAKASSAR
69	MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H. NIP. 19790911 200312 1 001	IV/a	WAKIL KETUA PN MASAMBA	L	PT MAKASSAR
70	JAWARUDDIN, SH NIP. 19630804 199103 1 001	III/d	PANITERA PN MASAMBA	L	PT MAKASSAR
71	I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA W. SH NIP. 19771114 200212 1 005	IV/a	KETUA PN PASANGKAYU	L	PT MAKASSAR
72	ABDUL KADIR, SH., MH NIP. 19700409 199303 1 005	IV/a	PANITERA PN PASANGKAYU	L	PT MAKASSAR
73	PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 19760512 200112 1 004	IV/a	KETUA PN BELOPA	L	PT MAKASSAR
74	MUSLIMIN, SH NIP. 19661231 199003 1 024	III/d	PANITERA PN BELOPA	L	PT MAKASSAR
75			KEJAKSAAN MAKASSAR		KEJAKSAAN MAKASSAR
76			KEJAKSAAN MAKASSAR		KEJAKSAAN MAKASSAR
77			POLRESTA MAKASSAR		POLRESTA MAKASSAR
78			POLRESTA MAKASSAR		POLRESTA MAKASSAR
79			LAPAS MAKASSAR		LAPAS MAKASSAR
80			LAPAS MAKASSAR		LAPAS MAKASSAR

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

JADWAL ACARA

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
Novotel Makassar Grand Shayla Jl. Chairil Anwar No. 28 Sawerigading, Kec. Ujung
Pandang Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90115 Telp : (0411) 3619444.

NO.	HARI / TANGGAL WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1.	Selasa, 29 Juni 2021	<i>Berpakaian Batik</i>	KETERANGAN
	14.00 – 17.00	Check in dan Registrasi	Penyelenggara/Panitia
	17.00 - 19.00	ISHOMA/Makan Malam	
	19.00 - 21.30	Acara Pembukaan : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne MA c. Pembacaan Do'a d. Laporan penyelenggara e. Sambutan, Pembukaan dan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembawa Acara Seluruh Hadirin Peserta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
	21.30 – 21.45	Coffee Break	
2.	Rabu, 30 Juni 2021	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	06.00 – 07.30	Sarapan	Penyelenggara
	07.30 – 08.00	Absen daftar hadir peserta	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 10.00	Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam penegakan hukum di Indonesia	- Akademisi Univ. Hasanuddin - Hakim Tinggi PT. Tanjung Karang.
	10.00 – 10.15	Coffee Break	
	10.15 – 12.00	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam tahap penyelidikan menurut perspektif Kepolisian.	- Kepolisian Resort kota Makassar - Direktur tenaga Teknis Peradilan Umum.
	12.00 – 13.00	ISHOMA/Makan Siang	
	13.00 – 15.00	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum	- Kejaksaan Negeri Makassar - Direktur tenaga Teknis Peradilan Umum.
	15.00 – 15.15	Coffee Break	
	15.15 – 17.30	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum	- Hakim Tinggi PT. Tanjung Karang. - Direktur tenaga Teknis Peradilan Umum.
	17.30 – 19.00	Makan Malam	
	19.00 – 21.00	Lanjutan Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	

3.	Kamis, 1 Juli 2021	<i>Berpakaian Dinas Harian</i>	KETERANGAN
	06.00 – 07.30	Sarapan	
	07.30 – 08.00	Absen daftar hadir peserta	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 10.00		Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	10.00 – Selesai	Acara Penutupan: a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri c. Sambutan dan Penutupan Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum d. Doa e. Pembagian Sertifikat	Pembawa Acara Peserta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Panitia

Jakarta, 8 Juni 2021

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
 Peradilan Umum



Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.